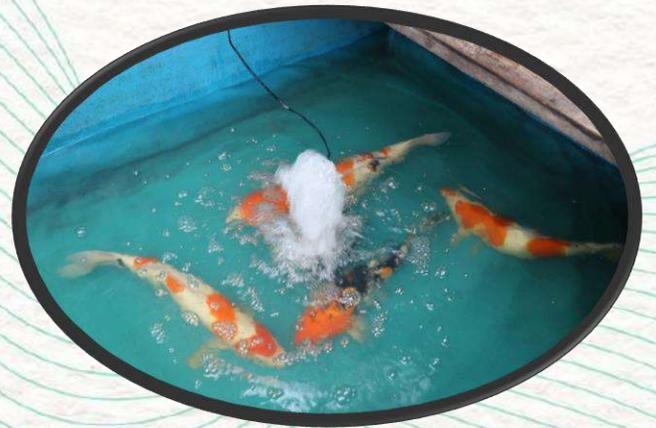




RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



DINAS PERIKANAN KABUPATEN DELI SERDANG

Jalan Mawar No. 12 Lubuk Pakam

Telp. (061) 7954296

E-mail : dinasperikanan@deliserdangkab.go.id

Website : dinasperikanan.deliserdangkab.go.id



TIM PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

**DINAS PERIKANAN KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2025-2029**

**Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Deli Serdang**

Tim Pengarah :

Ketua : Sekretaris

**Anggota : Kabid. Perikanan Budidaya
Kabid. Perikanan Tangkap
Kabid. Pengawasan dan Bina Usaha
Perikanan**

**Tim Pelaksana : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
: Analis Kebijakan Ahli Muda
: Pelaksana Struktural**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang baik yang dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN ataupun sumber-sumber dana lainnya untuk periode Tahun 2025-2029.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang ini dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Deli Serdang, khususnya bagi perkembangan perekonomian pembudidaya ikan, nelayan dan stake holder perikanan lainnya.

Lubuk Pakam, Juli 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Deli Serdang,



Drs. Iwan Januar Salewa

Pembina Tk. I

NIP 19690112 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUNAN RENSTRA PD	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penyusunan	I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-9
2.1. Gambaran Pelayanan	II-9
2.1.2. Sumber Daya Dinas Perikanan	II-12
A. Sumber Daya Manusia	II-13
B. Sarana dan Prasarana Kerja	II-14
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	II-17
A. Produksi Perikanan	II-17
B. Kinerja Anggaran	II-19
C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-27
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	II-28
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-31
3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-31
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan	III-37
3.2.1. Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	III-37
3.2.2. Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	III-37
3.2.3. Manajemen Risiko	III-39
3.3. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	III-41
3.4. Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	III-41
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-43
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	IV-43
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)....	IV-87
BAB V. PENUTUP	V-90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Struktur Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	II-13
Tabel 2.2 Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pejabat di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	II-13
Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan Pejabat di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	II-14
Tabel 2.4 Tingkat Status ASN dan Non ASN di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	II-14
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	II-14
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	II-21
Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Perikanan	II-30
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan.....	III-38
Tabel 3.2 Tahapan Pembangunan Renstra Dinas Perikanan	III-41
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan	III-42
Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang	IV-49
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-64
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-85
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan	IV-88
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan	IV-89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alur Dokumen Perencanaan Hubungan Antara Keterkaitan	I-4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Deli Serdang	II-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

A. Pengertian Rencana Strategis (Renstra)

Pembangunan di sektor perikanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Untuk itu perencanaan maupun pelaksanaannya dilakukan secara terkoneksi dan merupakan satu kesatuan. Tujuan pembangunan sektor perikanan adalah sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas dan kapasitas pelaku usaha perikanan, pembangunan sarana dan prasarana, serta penataan dan pengembangan kelembagaan Dinas Perikanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sinergitas sumberdaya manusia bersama-sama dengan sumberdaya alam, teknologi dan dalam menggerakkan pembangunan perikanan agar peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan optimal. Oleh sebab itu, masih sangat diperlukan inovasi-inovasi dan kreatifitas yang strategis dalam meningkatkan jumlah produksi ikan guna mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Jika dilihat dari karakteristik sosial-ekonomi penduduk sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah nelayan dan petani ikan (pembudidaya ikan).

Suatu perencanaan yang komprehensif yaitu memuat rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh semua unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang. Perencanaan dimaksud adalah Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Prinsip-prinsip penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu-kesatuan dalam perencanaan pembangunan, dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan juga merupakan integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dokumen Renstra ini dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 dalam penyusunannya mengacu kepada rancangan awal RPJMD 2025-2029, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renstra, juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

B. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan memiliki fungsi yaitu :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja;
2. Sebagai Pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek;
3. Sebagai pedoman bagi Pimpinan /Kepala Perangkat Daerah dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

C. Proses Penyusunan Renstra

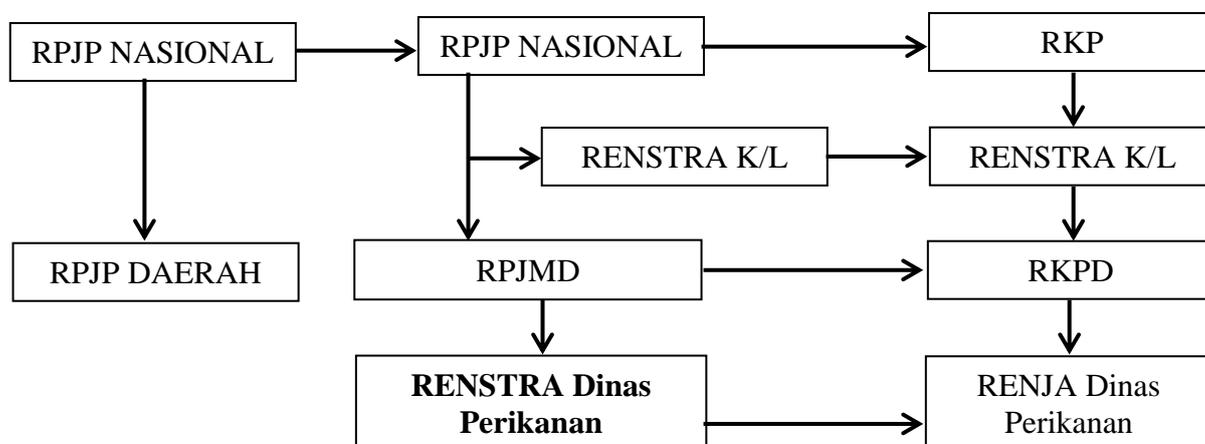
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 dalam penyusunannya mengacu kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.

Adapun tahapan dalam proses penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan dengan membentuk tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra bertugas merumuskan rancangan Renstra berupa isu-isu strategis atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra;
- 2) Tahap Penyusunan Rancangan Awal, dilakukan setelah perumusan isu strategis beserta cara mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan strategis beserta pagu anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang diharapkan;
- 3) Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra yaitu proses penyusunan dokumen berdasarkan sistematika penyusunan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
- 4) Penetapan Dokumen Renstra.

D. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan Perubahan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1: Bagan Alur Dokumen Perencanaan Hubungan Antara Keterkaitan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2045.
23. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Adapun maksud penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini sebagai berikut:

- a. Pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- b. Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian Arah dan

Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bagi Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode 2025-2029.

B. Tujuan.

Berdasarkan maksud Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang diatas maka tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- a. Untuk memberikan petunjuk arah pembangunan di bidang Perikanan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025-2026;
- b. Mendorong Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan kinerjanya;
- c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan menjadi bahan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebelumnya;
- d. Penguatan peran stakeholder dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- e. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini dijelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini berisi penjelasan tentang peran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah serta mengemukakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perikanan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian penyelenggaraan pembangunan perikanan di masa yang akan datang

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Renstra serta rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Pada bagian ini juga memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh organisasi dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan dan sasaran suatu organisasi. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.

Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas dan fungsi adalah suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Dalam hal ini Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perikanan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Perikanan Tangkap;
4. Bidang Perikanan Budidaya;
5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan;
6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 95 Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang mempunyai Tugas pokok membantu Bupati Deli Serdang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Perikanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
4. Pembinaan teknis bidang perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Sekretariat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran dinas;
2. Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan dinas.

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Perikanan Tangkap. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perikanan Tangkap;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Perikanan Tangkap;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perikanan Tangkap.

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang

Perikanan Budidaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Perikanan Budidaya;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Perikanan Budidaya.

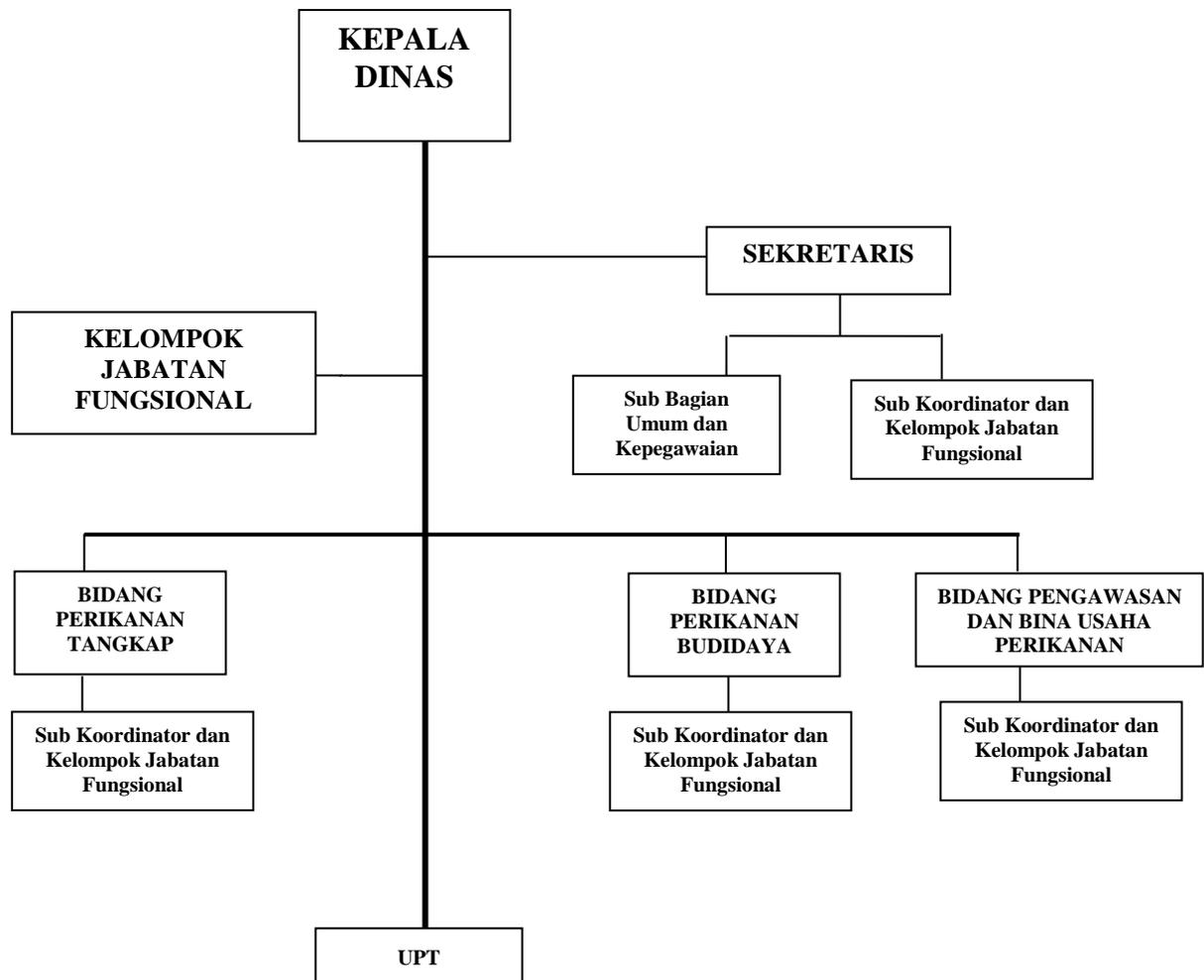
Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan;.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengawasan dan Bina Usaha Perikanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh beberapa pejabat struktural eselon IV yaitu :

1. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Perikanan Tangkap, dibantu oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perikanan Budidaya, dibantu oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Bina Usaha Perikanan, dibantu oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Air Tawar.

Adapun bagan struktur organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang disajikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*). Setiap sumber daya memiliki kegunaan yang lebih spesifik dan memiliki ciri tersendiri, ada yang berguna bagi kehidupan di daerah itu sendiri dan ada yang berguna bagi daerah lain. Sumberdaya yang disusun dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

A. Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek yang amat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Sumberdaya manusia merupakan kunci yang dapat memastikan kemajuan suatu organisasi. Pada hakikatnya, sumberdaya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Adapun sumberdaya manusia yang dimiliki terdiri dari jabatan dan golongan tingkat pendidikan, status kepegawaian. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Struktur Jabatan Dinas Perikanan
Kabupaten Deli Serdang

No.	Jabatan	Jumlah (org)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Kepala Bidang	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	1	1
5.	Kepala UPT	-	1	1
6.	Jabatan Fungsional	6	8	14
7.	Pelaksana Struktural	4	4	8
Jumlah		14	15	29

Sumber: Dinas Perikanan Deli Serdang, 2024

Tabel 2.2. Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan Pejabat di Dinas Perikanan
Kabupaten Deli Serdang

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (org)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	1	1
3.	Pembina (IV/a)	1	-
4.	Penata Tk. I (III/d)	8	4
5.	Penata (III/c)	1	1
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	8
7.	Penata Muda (III/a)	-	1
8.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-
9.	Pengatur (II/c)	1	-
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-
11.	Pengatur Muda (II/a)	-	-
J u m l a h		14	15

Sumber: Dinas Perikanan Deli Serdang, 2024

Tabel 2.3. Tingkat Pendidikan Pejabat di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		Laki	Perempuan
1.	Strata 3 (S3)	-	-
2.	Strata 2 (S2)	2	3
3.	Starata 1 (S1)	11	11
4.	D III	-	-
5.	SMA/SLTA	1	1
J u m l a h		14	15

Sumber: Dinas Perikanan Deli Serdang, 2024

Tabel 2.4. Tingkat Status ASN dan Non ASN di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	
		Laki	Perempuan
1.	ASN	14	15
2.	Non ASN	43	12
J u m l a h		57	27

Sumber: Dinas Perikanan Deli Serdang, 2024

B. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk mencapai suatu kegiatan yang efektif dan efisien didalam sebuah organisasai tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha yang dapat berupa benda dan dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Perikanan Deli Serdang adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut sebagai peralatan pembantu ataupun peralatan utama. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Perikanan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Pompa Celup	6	Buah
2.	Staion Wagon	4	Unit
3.	Minibus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	3	Unit
4.	Sepeda Motor	17	Unit
5.	Gerobak Tarik	1	Unit
6.	Mesin Bor	1	Buah
7.	GPS	5	Buah

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
8.	Keramba	43	Unit
9.	Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan	2	Paket
10.	Kultur Pakan Alami Larva Ikan	1	Paket
11.	Sarana Pengukuran dan Pemeriksaan Kesehatan Ikan/Mutu Benih	1	Paket
12.	Jaring Induk	5	Unit
13.	Jaring Larva	5	Unit
14.	Jaring Benih	6	Unit
15.	Mesin Ketik Manual Standar	4	Unit
16.	Lemari Besi	23	Unit
17.	Rak Besi/Metal	3	Unit
18.	Filling Besi/Metal	27	Unit
19.	Brand Kas	1	Unit
20.	Alat Penghancur Kertas	3	Buah
21.	Mesin Absensi	2	Buah
22.	Genset	1	Unit
23.	Mesin Pompa Air	22	Unit
24.	Plang Reklame Sosialisasi Program Kerja	1	Unit
25.	Lemari Kayu	2	Unit
26.	Meja Rapat	31	Buah
27.	Kursi Rapat	88	Buah
28.	Kursi Putar	13	Buah
29.	Kursi Lipat	72	Buah
30.	Sofa	2	Unit
31.	Tempat Tidur (Spring Bad)	4	Unit
32.	Kursi Kerja	1	Buah
33.	Gordyn	2	Paket
34.	Karpet	1	Paket
35.	Rel Gordyn	1	Paket
36.	Lemari Gantung	2	Unit
37.	Mesin Potong Rumput	7	Unit
38.	Mesin Cuci	1	Unit
39.	Lemari Es	3	Unit
40.	AC Unit	3	Unit
41.	AC Split	17	Unit
42.	Kipas Angin	8	Buah
43.	Exhause Fan	5	Unit
44.	Dispenser	7	Unit
45.	Televisi	10	Unit
46.	Wireless Speaker	2	Unit
47.	Aquarium	200	Buah
48.	Tangga Alumunium	2	Buah
49.	Lampu Hias	1	Unit
50.	Blower	13	Unit
51.	Selang	1	Unit
52.	P.C Unit/Komputer PC	10	Unit
53.	Lap Top	21	Unit
54.	Note Book	3	Unit

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
55.	Personal Komputer Lain-lain	1	Unit
56.	Printer	22	Unit
57.	UPS	3	Unit
58.	Website	1	Buah
59.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
60.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
61.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	Unit
62.	Meja Kerja	45	Buah
63.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Unit
64.	Camera + Attachment	6	Unit
65.	Proyektor + Attachment	4	Unit
66.	Slide Projector	1	Buah
67.	Sound System	1	Unit
68.	Tabung Oksigen	3	Unit
69.	Bak Fiberglass	72	Buah
70.	PH Meter	1	Unit
71.	Freezer	4	Unit
72.	Mesin Pemanas	2	Unit
73.	Alat Selam	2	Unit
74.	Mikroskop	1	Unit
75.	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah	1	Paket
76.	CCTV	2	Paket
77.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	Unit
78.	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3	Unit
79.	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Unit
80.	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	2	Unit
81.	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	2	Unit
82.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2	Unit
83.	Bangunan Kamar Mandi	2	Unit
84.	Gedung Pertokoan/Koperasi Semi Permanen	1	Unit
85.	Gedung Menara Peninjau Permanen	1	Unit
86.	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	2	Unit
87.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	Unit
88.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	1	Unit
89.	Konstruksi Pagar	3	Unit
90.	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	1	Unit
91.	Rumah Negara Golongan III Type C Permanen	3	Unit
92.	Menara Air	1	Unit

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Kinerja pelayanan adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Selain itu, kinerja pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain. Pengukuran kinerja pelayanan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mengevaluasi dan membenahi sistem yang berjalan dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah. Adapun kinerja pelayanan yang akan diuraikan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari jumlah produksi ikan yang dihasilkan dan kinerja anggaran yang telah dilaksanakan.

A. Produksi Perikanan

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya. Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2020-2024 untuk sektor produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 (T-C.23). Pencapaian Kinerja Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Prangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	198.039,85	201.278	204.666	246.341	252.751	189.077,63	215.389,23	204.666	176.692,14	174.048,17	95,47	107,01	100	71,73	68,86
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	74	76	78	80	82	76,64	79,08	82	85,14	81,75	103	104	105	106,42	99,70
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	73	76	79	82	75,80	76,59	70,32	79,32	76,17	108	105	93	100	92,89

Berdasarkan Tabel diatas, dapat kita lihat pada indikator kinerja Dinas Perikanan untuk tahun 2020-2024 yaitu Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.6. diatas dapat kita lihat bahwa realisasi capaian untuk indikator Jumlah Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 dan konsisten di rasio capaian 100 % hingga Tahun 2022 namun terjadi penurunan capaian kinerja di Tahun 2023 dan 2024. Target dan capaian dari indikator tersebut dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen utama yaitu produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap serta produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Peningkatan capaian kinerja indikator Jumlah Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Tahun 2021 dan 2022 dipengaruhi oleh peningkatan capaian produksi dari salah satu sektor yang mendukungnya yaitu dari sektor perikanan tangkap. Peningkatan capaian produksi disebabkan bertambahnya jumlah nelayan, armada penangkapan dan alat tangkap ikan.

Pada Tahun 2023 dan 2024 terlihat capaian kerjanya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena capaian produksi dari sektor perikanan budidaya, tangkap dan olahan hasil perikanan mengalami penurunan. Sektor Perikanan Budidaya mengalami penurunan capaian produksi karena mahalny harga pakan, adanya hama penyakit ikan dan pintu irigasi untuk pengairan kolam khususnya di Kecamatan Biru-Biru mengalami kerusakan sehingga kuantitas air berkurang. Bencana banjir akibat curah hujan yang tinggi pada bulan Desember tahun 2024 di Kec. STM Hilir, Patumbak, Biru-Biru, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Sunggal, Sibolangit, Galang, Namorambe dan Hampan Perak sehingga sebagian besar pembudidaya ikan di wilayah tersebut mengalami gagal panen. Berkurangnya jumlah pembudidaya ikan karena beralih profesi.

Penurunan produksi perikanan tangkap terjadi karena adanya aktivitas pengerukan pasir di sekitar wilayah penangkapan khususnya di Kecamatan Pantai Labu. Penyebab lainnya adalah berkurangnya jumlah nelayan, ketersediaan BBM bersubsidi yang belum mencukupi kebutuhan nelayan serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan karena terbatasnya anggaran. Masih ada nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak terumbu dan rumpun ikan. Selain itu adanya kapal nelayan yang tertangkap di negara lain karena melintasi batas wilayah.

Sektor pendukung lainnya yang mengalami penurunan capaian kinerja yaitu produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan bahan baku pengolahan akibat menurunnya produksi perikanan budidaya dan penangkapan.

B. Kinerja Anggaran

Anggaran adalah suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun. Kinerja Anggaran adalah *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk mengukur produksi dan/atau mengembangkan suatu produk atau jasa. Penilaian dan pengukurannya dilakukan dengan cara mengelompokkan rekening anggaran ke

dalam suatu kategori yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut.

Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga dalam pengukurannya diharapkan menghasilkan sesuatu kinerja dengan tingkat efisiensi yang seoptimal mungkin. Dana yang tersedia dalam APBD dan DAK (Dana Alokasi Khusus) harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dan juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Kinerja anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dilihat dengan menyangdingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan program-program prioritas yang mendukung kualitas kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara rinci program-program tersebut diuraikan dalam tabel tabel 2.7 berikut ini:

**Tabel 2.7(T-C.24). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Deli Serdang**

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.885.000	-	-	-	-	811.063.322	-	-	-	-	85,21	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.910.000	-	-	-	-	372.124.373	-	-	-	-	89,69	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.000.000	-	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	87.299.000	-	-	-	-	82.421.000	-	-	-	-	94,41	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	5.212.848.131	5.198.554.088	5.291.334.115	6.021.146.005	-	4.047.457.383	4.309.037.890	4.415.347.812	5.237.621.898	-	77,64	82,89	83,44	86,99	0,38	2,23
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.448.465.000	-	-	-	-	1.558.604.104	-	-	-	-	63,66	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	2.791.082.791	2.566.758.289	1.084.648.048	1.129.119.059	-	1.304.200.824	2.387.813.844	808.777.804	952.164.364	-	46,73	93,03	74,57	84,33	-16,44	4,24
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5.904.958.281	-	-	-	-	3.835.755.304	-	-	-	-	64,96	-	-	-	-	-	-
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	4.942.336.390	3.616.034.960	3.707.987.408	4.732.900.210	-	3.008.453.851,95	2.487.498.664	3.554.446.113	4.056.820.921	-	60,87	68,79	95,86	85,72	-6,07	6,39
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	-	36.136.488	18.901.227	-	6.259.615	-	34.237.750	-	-	-	-	94,75	0,00	-	0,00	-36,92	-
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	1.038.726.803	609.773.768	795.580.616	417.944.710	-	422.152.180	489.761.500	571.845.932	307.453.868	-	40,64	80,32	71,88	73,56	-2,71	8,19
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	674.847.000	-	-	-	-	654.046.736	-	-	-	-	96,92	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	10.504.364.281	14.021.130.603	12.010.022.332	10.879.550.187	12.307.369.599	7.336.014.839	8.816.501.988,95	9.674.111.898	9.350.417.661	10.554.061.051	69,84	62,88	80,55	85,94	85,75	4,57	7,89

Berdasarkan data dari tabel 2.7. diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, kinerja keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang masih menggunakan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program-Program yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Namun seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 dan yang terbaru berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Meneteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program yang digunakan berdasarkan peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Rata-rata pertumbuhan anggaran terlihat diangka 4,57 % sedangkan pertumbuhan realisasinya berada di angka 7,89 %.

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi dan perubahan yang terjadi melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana dipahami bahwa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.

Keadaan lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi tersebut.

Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi dan segenap jajarannya untuk secara intens memantau dan mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang akan tetap eksis dan mampu mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perikanan secara optimal di Kabupaten Deli Serdang. Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan metode “ Analisis SWOT ” (*Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini secara efektif sangat membantu lembaga/institusi dalam menemukan dan mengenali potensi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi kedepannya, sehingga dapat diambil sebuah arah kebijakan dengan melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Analisis SWOT merupakan analisis

keadaan internal ataupun eksternal suatu organisasi yang berikutnya akan diterapkan sebagai dasar untuk merancang taktik dan program kerja. Analisa internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisa eksternal mencakup elemen peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*).

Adapun empat unsur *strenghts, weakness, oppurtunities, threats* yang terangkum dalam lingkungan internal dan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

C.1. Analisis Lingkungan Internal

Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana, sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang diperlukan dan dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang. Faktor internal akan memberikan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) pada organisasi. Berikut ini peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh stakeholder dalam rangka pengembangan sektor perikanan. Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal yang telah dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Analisis Lingkungan Internal yang memberikan dorongan kekuatan (*strenghts*) pada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Tugas Fungsi dan Kewenangan Yang Jelas sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 95 Tahun 2021;
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- c. Tersedianya potensi sumberdaya perikanan;

- d. Adanya permintaan pasar atas komoditas perikanan;
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai;
- f. Adanya komitmen pihak atasan untuk meningkatkan kualitas SDM;
- g. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk pembangunan bidang perikanan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Analisis Lingkungan Internal yang merupakan kelemahan (*weakness*) pada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional dibidang teknis dan manajemen Perikanan;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
- c. Masih lemahnya nilai posisi tawar pembudidaya ikan, pengolahan pemasaran dan nelayan;
- d. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap pembudidaya ikan, pengolahan pemasaran dan nelayan;
- e. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya Perikanan;
- f. Masih lemahnya pengawasan terhadap perikanan tangkap dan budidaya ikan;

C.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah analisis faktor yang tidak dimiliki oleh organisasi atau dengan kata lain merupakan sesuatu yang berwujud peluang dan hambatan dari luar, karena berada di luar dan dimiliki oleh organisasi atau sistem lain. Berikut ini adalah faktor eksternal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang:

1. Peluang

Analisis Lingkungan Eksternal yang memberikan dorongan peluang (*opportunitis*) pada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya sumber daya perikanan yang besar dengan panjang pantai \pm 65 km;
- b. Tersedianya lahan budi daya baik air tawar dan air payau;
- c. Kehadiran kemitraan (investor) dalam hal pengembangan perikanan;

- d. Masih kuatnya rasa kebersamaan dan gotong royong di masyarakat khususnya wilayah pesisir;
- e. Perhatian pemerintah yang cukup serius dalam pengadaan sarana dan prasarana perikanan dari alokasi APBD dan hibah swasta;
- f. Adanya komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan Gizi Masyarakat melalui program GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan);
- g. Terbukanya Pasar regional (lokal) dan Internasional (Eksport);
- h. Adanya dukungan lembaga keuangan;
- i. Tersedianya Sumberdaya Manusia Pembudidaya Ikan, Pengolahan Pemasaran dan nelayan;
- j. Adanya Expo dan Promosi baik ditingkat daerah maupun tingkat Nasional;

2. Tantangan/Ancaman (*Threats*)

Analisis Lingkungan Eksternal yang merupakan Tantangan/ancaman (*Threats*) pada Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Adanya alih fungsi lahan perikanan menjadi permukiman dan perkebunan;
- b. Masih adanya konflik penggunaan air irigasi antara petani sawah dengan pembudidaya ikan;
- c. Adanya pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai dan wilayah pesisir;
- d. Mahalnya harga pakan ikan, sarana dan prasarana dan Obat-obatan perikanan;
- e. Masih adanya serangan penyakit pada komoditi budidaya perikanan;
- f. Masih terjadinya konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan perairan laut;
- g. Adanya egosentris masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung program masing-masing.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 direncanakan selaras dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Adapun salah satu misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang adalah misi ke-3 yaitu Sehat Ekonominya

memiliki Tujuan salah satunya yaitu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat akibat (dengan) tersedianya Lapangan Pekerjaan dan Tumbuhnya Wirausahawan Baru. Outcome yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dengan salah satu sasarannya yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan”.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang menyusun Renstra yang diarahkan kepada pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya para pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dan pembudidaya Ikan disertai dengan pemberian bantuan hibah sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi perikanan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein dan penyediaan lapangan kerja. Bila sektor perikanan dikelola secara serius, maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani ikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai tugas dan fungsi pada sektor perikanan. Kebijakan dan strategi di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun hasil pengolahan perikanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan protein ikan. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, maka diuraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan produksi perikanan;
2. Rendahnya kapasitas pelaku usaha perikanan dalam mengelola sumber daya perikanan

3. Terbatasnya ketersediaan benih dan ikan unggul;
4. Pendangkalan alur sungai yang menghambat jalur keluar dan masuk sampan nelayan;
5. Tingginya harga pakan ikan;
6. Pencemaran air yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga;
7. Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif yang dapat merusak ekosistem laut dan habitat ikan;
8. Rendahnya mutu dan keamanan hasil pengolahan perikanan;
9. Kurangnya promosi hasil perikanan.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi atau diperkirakan akan terjadi dan memiliki urgensi untuk dipecahkan. Manakala hal tersebut tidak dipecahkan akan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara serius, sistematis dan komprehensif.

Isu strategis yang menjadi fokus perhatian bagi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.8. Isu Strategis Dinas Perikanan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERIKANAN	PERMASALAHAN DINAS PERIKANAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERIKANAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PERIKANAN			ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan meningkatkan kemandirian pangan melalui optimalisasi dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kelautan (Ranwal RPJMD Hal: II-5)</p> <p>2. Penerapan Ekonomi Biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Ranwal RPJMD Hal: II-58)</p>	<p>1. Terbatasnya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan produksi perikanan</p> <p>2. Rendahnya kapasitas pelaku usaha perikanan dalam mengelola sumber daya perikanan</p> <p>3. Pendangkalan alur sungai yang menghambat jalur keluar dan masuk sampan nelayan;</p> <p>4. Tingginya harga pakan ikan;</p> <p>5. Pencemaran air yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga;</p> <p>6. Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif yang dapat merusak ekosistem laut dan habitat ikan;</p> <p>7. Rendahnya mutu dan keamanan hasil pengolahan perikanan;</p> <p>8. Kurangnya promosi hasil perikanan</p>	<p>Ekonomi Regional, Inklusif dan Berkelanjutan, mencakup: nilai tambah ekonomi industri, pertanian, pariwisata, kesempatan kerja bagi semua keahlian, pertumbuhan dan akses pembiayaan bagi UMKM dan industri kecil, dukungan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital, mitigasi dan ketangguhan terhadap perubahan iklim dan bencana alam (Ranwal RPJMD Hal: II-232)</p>	<p>Perubahan ekosistem dunia akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, urbanisasi, pertanian, dan penangkapan ikan yang berlebihan merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem (Ranwal RPJMD Hal: II-232)</p>	<p>Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung, Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2029 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis (Ranwal RPJMD Hal: II-232)</p>	<p>Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. (Ranwal RPJMD Hal: II-232)</p>	<p>1. Menurunnya hasil tangkapan ikan</p> <p>2. Menurunnya produksi perikanan budidaya</p> <p>3. Masih ditemukannya pelanggaran dalam pengelolaan sumberdaya perikanan</p> <p>4. Rendahnya konsumsi ikan masyarakat</p>

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 yang merupakan tahap ke-4 (empat) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang. Selain itu dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada masa periode Pemerintahan tahun 2025-2029, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2025-2029.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sebagai berikut:

**“Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera,
Religius dan Berkelanjutan”**

Definisi dari visi RPJMD Deli Serdang adalah:

1. **Sehat:** Kabupaten Deli Serdang memiliki akses layanan kesehatan yang modern dan merata di seluruh wilayah. Seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali sehingga masyarakat Deli Serdang menjadi produktif;
2. **Cerdas:** Masyarakat Deli Serdang yang cerdas mampu berpikir kritis dan inovatif sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
3. **Sejahtera:** Masyarakat Deli Serdang yang memiliki standar hidup yang layak, di mana mereka mampu semakin makmur dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak hanya sejahtera secara ekonomi tapi juga sejahtera secara sosial;
4. **Religius:** Masyarakat Deli Serdang yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga menciptakan lingkungan yang rukun, aman, nyaman dan harmonis;

5. **Berkelanjutan:** Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah yang memiliki lingkungan yang asri dan lestari, di mana bebas dari polusi, serta pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bertempat tinggal.

Pencapaian visi tersebut didukung dengan 4 misi pembangunan jangka menengah antara lain sebagai berikut:

1. Sehat Pelayanan Publiknya

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mereformasi tata kelola pemerintahannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat akan mudah mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui penerapan sistem berbasis teknologi digital pada setiap aspek pelayanan yang cepat, transparan dan mudah. Digitalisasi pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi 36 pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM ASN melalui pendidikan dan pengembangan sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari misi ini, yaitu “Terwujudnya pemerintahan yang profesional, sigap, dan payom serta anti korupsi”, di mana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki ASN yang profesional dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik melalui reformasi pada tata kelola pemerintahan sehingga memberikan pelayanan publik yang prima.

Terdapat 3 sasaran untuk tujuan ini, yaitu :

- a. Meningkatnya SDM ASN yang profesional dan berintegritas
- b. Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah;
- c. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk menjalankan Misi ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki beberapa Program Unggulan antara lain :

- a. Program berjemur (Bupati Kerja Bertemu Rakyat);
- b. Program CTM (Cepat, Transparan, Mudah);
- c. Program Paten Kali (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Lengkap dan Elektronik)

2. Sehat Masyarakatnya

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mempromosikan gaya hidup sehat, berupaya untuk mencegah penyakit, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah yang terpencil. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat, serta pencegahan stunting dan gizi buruk pada anak. Selain sehat, pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga berupaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang produktif, tangguh, berkarakter dan berkualitas sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan daerah.

Tujuan untuk misi ini, yaitu “Meningkatnya derajat kehidupan masyarakat karena semakin terjangkaunya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan pembinaan karakter yang berkualitas”. Hal ini berarti seluruh masyarakat dapat merasakan dampak positif dari hasil pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mencakup seluruh lapisan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara inklusif. Pada misi ini terdapat 4 sasaran yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan;
- c. Meningkatnya kualitas pembinaan karakter masyarakat;
- d. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat.

Untuk menjalankan Misi ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki beberapa Program Unggulan antara lain :

- a. Program Deli Serdang Sehat, meliputi :
 - Program BPJS gratis bagi warga miskin, tidak mampu dan kriteria lain;
 - Program faskes paripurna/rumah sakit lengkap;
 - Program PAS PULA (Pelayanan Kesehatan Unregister dan Lainnya);
 - Program pembiayaan gotong royong.
- b. Program Evoria (even olah raga, seni budaya dan keagamaan);
- c. Program Pemula (pendidikan murah dan berkualitas). SD dan SMP unggulan, kuota mahasiswa daerah, bantuan perlengkapan sekolah, insentif pembangunan sekolah atau gedung baru;
- d. Program Guru Senyum (Guru Sejahtera, Nyaman Mengajar, Berkualitas dan Membanggakan);
- e. Program Dukungan bagi Masyarakat Rentan Sosial Ekonomi;
- f. Program Dukungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

3. Sehat Ekonominya

Misi ini menekankan pada peningkatan perekonomian daerah, di mana hal ini akan dicapai melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan daerah. Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan hilirisasi produk-produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan ekspor produk daerah dan bersaing di pasar domestik dan global. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan potensi ekonomi baru, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah akan meningkatkan daya tarik destinasi wisatanya melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan sehingga tidak hanya menarik wisatawan domestik, namun juga wisatawan nasional. Dukungan terhadap sektor-sektor tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan hal yang sama. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan investasi pada daerahnya sehingga daerah.

mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Tujuan untuk mendukung misi tersebut, yaitu “Meningkatnya pendapatan masyarakat akibat (dengan) tersedianya lapangan pekerjaan dan tumbuhnya wirausahawan baru”, di mana Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan perekonomian daerahnya melalui peningkatan investasi, terkhusus pada sektor unggulan daerah, serta meningkatkan jumlah wirausaha daerah yang akan berpengaruh bagi peningkatan lapangan pekerjaan daerah dan pendapatan masyarakat. Terdapat 7 sasaran untuk mendukung tujuan tersebut, yaitu :

- a. Penurunan angka pengangguran;
- b. Penurunan angka kemiskinan;
- c. Terjaganya stabilitas harga barang kebutuhan pokok;
- d. Meningkatnya hilirisasi dan ekspor produk industri;
- e. Meningkatnya produktivitas pertanian yang berkelanjutan;
- f. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan
- g. Meningkatnya jumlah wirausaha;
- h. Meningkatnya kemandirian desa;
- i. Meningkatnya nilai investasi;
- j. Meningkatnya kemandirian daerah.

Untuk menjalankan Misi ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki beberapa Program Unggulan antara lain :

- a. Program Pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. Program Percepatan Pencetakan Wirausaha Baru dan Pendampingannya;
- c. Program Pendampingan Kerja Luar Negeri;
- d. Program Kemudahan Perizinan Investasi;
- e. Program Kemudahan Berusaha UMKM/IKM;
- f. Program Mudah Kerja (warga miskin mendapat kuota khusus melamar pekerjaan);
- g. Program Mudah Berpartisipasi;

- h. Program Peningkatan Keahlian Buruh Harian Lepas;
- i. Program Mudah Kreasi, Pengembangan di Bidang Ekonomi Kreatif melalui Penyediaan Workspace Gratis, Sertifikat Pelatihan, Kerjasama/Mitra Pemerintah;
- j. Program Pembangunan Pertanian Menuju Swasembada Pangan.

4. Sehat Lingkungannya

Pembangunan yang dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan isu lingkungan saat ini. Pembangunan akan difokuskan pada pembangunan yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan sehingga menjaga kelestarian sumber daya alam. Infrastruktur yang dibangun juga memenuhi kualitas yang unggul, ikonik dan tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim sehingga memitigasi dampaknya terhadap masyarakat. Sehat Lingkungannya juga berarti bahwa Deli Serdang menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat, di mana masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, damai dan bebas dari tindak kriminalitas. Masyarakat memiliki jiwa sosial yang tinggi, rukun, damai dan rasa kebhinekaan.

Tujuan dari misi ini, yaitu “Meningkatnya kualitas lingkungan untuk hidup secara ideal di Kabupaten Deli Serdang” yang berarti masyarakat dapat bertempat tinggal secara aman, nyaman, dan harmonis, serta memiliki kualitas lingkungan hidup yang layak pada setiap wilayahnya. Tujuan ini memiliki 4 sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas;
- b. Meningkatnya daerah yang aman dan kondusif;
- c. Meningkatnya pembangunan yang ramah lingkungan dan tangguh bencana;
- d. Meningkatnya ketahanan pangan.

Untuk menjalankan Misi ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki beberapa Program Unggulan antara lain :

- a. Program Rumah Sehat (tersedia jaringan air minum, sanitasi dan drainase);
- b. Program Patroli Lingkungan;

- c. Program Bina Mental Remaja dan Akhlak Masyarakat;
- d. Program Dua Pasti Jadi (2 usulan di musrenbang kecamatan pasti dikerjakan);
- e. Program Jumpa Dia (Jalan Utama Pasti Mantap di Deli Serdang)
- f. Program ATK (Alun-alun Tiap Kecamatan)
- g. Program Sakolah (Sampah Kita Olah);
- h. Program Rusunawa dalam Kota

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan.

3.2.1. Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Tujuan Dinas Perikanan yang akan dicapai atau dihasilkan merupakan penjabaran dari pernyataan Sasaran yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029. Tujuan yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah;
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2.2. Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik serta terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun rumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan yang berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang ditunjukkan pada table di bawah ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi ke-3 : Sehat Ekonomimnya										
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	101	102	103	104	105	106	
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Nilai)	100,22	100,60	101,08	101,56	102,04	102,52	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Total Produksi Perikanan (Persen)	100	100	100	100	100	100	
Misi ke-1 : Sehat Pelayanan Publiknya										
Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah	Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah		Indeks Pelayanan Publik (Angka)	3,01	3,21	3,42	3,65	3,8	4,05	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	82	82,50	83	83,50	84	84,50	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77	77,50	78	78,50	79	79,50	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77	77,5	78	78,5	79	79,5	
			Manajemen Resiko Indeks (Level)	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	

3.2.3. Manajemen Risiko

Dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran, perlu adanya suatu pengendalian terhadap hal-hal yang diprediksi akan muncul dan mengganggu dalam proses pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan Wali Kota /Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern, yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu Manajemen Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di Perikanan Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mengamankan upaya

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Adapun identifikasi risiko terhadap tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Identifikasi risiko terkait pencapain tujuan **Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya ikan** dengan sasaran **Meningkatnya Produksi Perikanan**, terdapat beberapa aspek yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko yang bisa saja muncul dan dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Maka Dinas perikanan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan yaitu dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan dan pembudidaya ikan tentang teknik penangkapan dan budidaya yang baik, serta manajemen usaha;
 - b. Pemberian bantuan sarana dan prasarana dan pengembangan teknologi yang dapat menunjang peningkatan produksi tangkapan ikan nelayan dan budidaya perikanan;
 - c. Melakukan Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk perikanan dan manfaatnya bagi kesehatan.
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi usaha perikanan untuk memastikan bahwa produksi berjalan dengan baik.

2. Identifikasi risiko terkait pencapain tujuan **Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah** serta **Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah** dengan Sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Daerah** serta **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**, hal-hal yang perlu dilakukan adalah penyederhaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas terkait pelayanan dan kinerja instansi pemerintah. Melakukan evaluasi dan

monitoring terkait pelaksanaan pelayanan dan kinerja untuk peningkatan kualitas yang diperlukan.

3.3. Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis.

Strategi yang hendak dilaksanakan Dinas Perikanan melalui Renstra ini yaitu melalui tema pembangunan yang disusun sebagai fokus pengembangan dan pembangunan perikanan yang diuraikan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Tahapan Pembangunan Renstra Dinas Perikanan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bimbingan dan Pelatihan Teknis bagi pelaku usaha perikanan	Penguatan Kapasitas Masyarakat Kawasan Pesisir	Penguatan Industri Kecil Menengah Pengolahan Ikan	Penguatan sistem distribusi pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Penguatan modal dasar sistem perikanan modern
Pemberian Bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan serta pemberdayaan /penguatan kelembagaan perikanan	Penguatan Rantai Pasok Perikanan	Penguatan Sistem Rantai Dingin untuk mengendalikan pasokan ikan dan harga produk perikanan		

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang

Pembangunan perikanan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya ikan. Arah kebijakan pembangunan perikanan saat ini difokuskan pada beberapa aspek penting seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Peningkatan pemberdayaan /pelatihan terhadap para nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok pengolahan perikanan Peningkatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Upaya untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk periode 2025-2026. Melalui Rencana Strategis ini Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.
 - c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

- d. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP).
 - e. Kegiatan Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Keg. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat;
 - Sub Kegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota;
 - Sub Kegiatan Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota;
 - Sub Kegiatan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan;
 - Sub Kegiatan Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan;
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko.
- c. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;

- Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kegiatan Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil;
- Sub Kegiatan Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

- d. Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 beserta pendanaannya ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi ke-3 Sehat Ekonominya							
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan				Nilai Tukar Nelayan (Nilai)		
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (Nilai)		
		Meningkatnya Produksi Perikanan			Persentase Total Produksi Perikanan (persen)		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				<i>Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Penangkapan ikan</i>	<i>Persentase dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan penangkapan ikan (%)</i>	<i>Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikandi Perairan Darat dalam Satu Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten /Kota yang Tersedia (Dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				<i>Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok nelayan</i>	<i>Persentase nelayan yang terampil dan berwawasan (%)</i>	<i>Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota</i>	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				<i>Tersedianya aktifitas layanan Tempat Pendaratan Ikan yang sesuai Standard dan Prosedur</i>	<i>Persentase ketersediaan Tempat Pendaratan Ikan yang sesuai Standard dan Prosedur (%)</i>	<i>Keg. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	
				Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				<i>Tersedianya Kapal Perikanan Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Terdaftar</i>	<i>Persentase Ketersediaan Kapal Perikanan Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Terdaftar</i>	<i>Keg. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</i>	
				Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	
				<i>Tersedianya Kapal Perikanan yang telah Tercatat sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Persentase Ketersediaan Kapal Perikanan yang telah Tercatat sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (%)</i>	<i>Keg. Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>	
				Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (Dokumen)	Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				<i>Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pembudidaya ikan</i>	<i>Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terampil dan berwawasan (%)</i>	<i>Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
				<i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan pembudidayaan ikan</i>	<i>Persentase ketersediaan data serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan pembudidayaan ikan (%)</i>	<i>Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikandalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikandalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Unit)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Unit)	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berwawasan dan sadar hukum dalam menjaga kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		Rasio Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan dalam Kegiatan Usaha Perikanan (%)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran hukum para pelaku usaha perikanan	Persentase pelaku usaha perikanan yang sadar dan patuh terhadap peraturan (%)	Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten /Kota	
				Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten /kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten /kota (Pelaku Usaha)	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
				Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten /kota (Pelaku Usaha)	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten /Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten /kota (Pelaku Usaha)	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
				Tersedianya Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit)	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	
				Terbentuknya Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumberdaya perikanan yang dibentuk (Orang)	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				<i>Meningkatnya ketersediaan data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</i>	<i>Persentase ketersediaan data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%)</i>	<i>Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				<i>Meningkatnya mutu dan keamanan hasil perikanan</i>	<i>Persentase ketersediaan unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terlatih dan telah memperoleh izin usaha (%)</i>	<i>Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				<i>Meningkatnya ketersediaan dan penyaluran bahan baku pengolahan ikan</i>	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan ketersediaan ikan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan (%)</i>	<i>Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</i>	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Ton)	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	
				<i>Meningkatnya Fasilitasi Akses Pasar dan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan untuk Skala Usaha Mikro dan Kecil</i>	<i>Persentase Ketersediaan Fasilitas Akses Pasar dan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan (%)</i>	<i>Keg. Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</i>	
				Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (Kg/Kapita/Tahun)	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
Misi ke-1 : Sehat Pelayanan Publiknya							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah	Meningkatnya pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah				Indeks Pelayanan Publik (Angka)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)		
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Manajemen Resiko Indeks (Level)		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	
				Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (Nilai)			
				Manajemen Resiko Indeks (Level)			
			<i>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkondisi baik</i>		<i>Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran (%)</i>	<i>Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				<i>Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase tertib administrasi dan pelaporan keuangan (%)</i>	<i>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang /Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				<i>Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	<i>Persentase Tertib Penataan dan Pengelolaan BMD /Aset (%)</i>	<i>Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				<i>Tersedianya administrasi pendapatan daerah</i>	<i>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)</i>	<i>Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)</i>	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				<i>Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Persentase tingkat disiplin aparatur (%)</i>	<i>Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				<i>Terpenuhinya kebutuhan umum kedinasan</i>	<i>Persentase ketersediaan pemenuhan layanan umum kedinasan (%)</i>	<i>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				<i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang fungsi kedinasan</i>	<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang fungsi kedinasan (%)</i>	<i>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<i>Tersedianya jasa penunjang urusan kedinasan</i>	<i>Persentase pemenuhan penunjang layanan kedinasan (%)</i>	<i>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				<i>Terjaganya fungsi dan kegunaan aset /barang</i>	<i>Persentase sarpras dan bangunan yang terpelihara fungsinya (%)</i>	<i>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	39.408,46	45.119	2.033.650.000	48.277	2.233.088.000	51.656	2.432.158.000	55.272	2.031.485.000	59.141	2.180.800.000	
<i>Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan penangkapan ikan (%)</i>	<i>67</i>	<i>100</i>	<i>1.198.100.000</i>	<i>100</i>	<i>1.309.600.000</i>	<i>100</i>	<i>1.421.100.000</i>	<i>100</i>	<i>932.600.000</i>	<i>100</i>	<i>994.100.000</i>	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten /Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	18.100.000	1	19.600.000	1	21.100.000	1	22.600.000	1	24.100.000	Dokumen Statistik Perikanan Tangkap
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	-	1	250.000.000	1	270.000.000	1	290.000.000	1	310.000.000	1	330.000.000	Pembangunan Tempat Tambat Sampan (Tangkahan)
		-	1	450.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	-	-	-	-	Pembangunan Docking Sampan

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	-	1.155	480.000.000	1.236	520.000.000	1.323	560.000.000	1.415	600.000.000	1.514	640.000.000	Pengadaan alat tangkap ikan, mesin, dan sampan
<i>Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase nelayan yang terampil dan berawasan (%)</i>	-	100	740.550.000	100	820.988.000	100	900.508.000	100	980.185.000	100	1.060.100.000	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	480	120	240.550.000	140	280.988.000	160	320.508.000	180	360.185.000	200	400.100.000	Pelatihan laminasi sampan, pelatihan pembuatan alat tangkap dan pelatihan perbaikan mesin sampan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya (Kelompok)	-	10	150.000.000	12	160.000.000	14	170.000.000	16	180.000.000	18	190.000.000	Sosialisasi terkait pembentukan dan pengembangan kelompok nelayan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	-	100	350.000.000	110	380.000.000	120	410.000.000	130	440.000.000	140	470.000.000	Pengadaan alat tangkap jaring mata 50, mesin sampan

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	<i>Persentase ketersediaan Tempat Pendaratan Ikan yang sesuai Standard dan Prosedur (%)</i>	-	100	60.000.000	100	64.500.000	100	69.550.000	100	74.700.000	100	79.600.000	
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	-	1	45.000.000	1	48.300.000	1	52.100.000	1	56.000.000	1	59.500.000	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	-	2	15.000.000	3	16.200.000	4	17.450.000	5	18.700.000	6	20.100.000	
<i>Keg. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase Ketersediaan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Terdaftar</i>	-	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.000.000	100	19.500.000	100	21.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan (Rekomendasi)	-	700	15.000.000	750	16.500.000	800	18.000.000	850	19.500.000	900	21.000.000	
<i>Keg. Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>	<i>Persentase Ketersediaan Kapal Perikanan yang telah Tercatat sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (%)</i>	-	100	20.000.000	100	21.500.000	100	23.000.000	100	24.500.000	100	26.000.000	
Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan (Dokumen)	-	700	20.000.000	750	21.500.000	800	23.000.000	850	24.500.000	900	26.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	44.803,90	52.693	3.889.000.000	54.121	4.156.157.000	56.180	4.431.832.000	57.407	4.716.928.000	59.874	5.063.252.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	<i>Persentase kelompok pembudidaya ikan yang terampil dan berwawasan (%)</i>	100	100	656.400.000	100	711.387.000	100	768.900.000	100	828.023.000	100	890.550.000	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	6	8	104.100.000	10	111.387.000	12	120.200.000	14	128.614.000	16	138.200.000	Sosialisasi pengembangan kapasitas pembudidaya ikan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	-	12	170.000.000	14	190.000.000	16	210.000.000	18	230.000.000	20	250.000.000	Sosialisasi terkait pembentukan dan pengembangan kelompok pembudidaya
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	26	20	382.300.000	22	410.000.000	24	438.700.000	26	469.409.000	28	502.350.000	Pelatihan Perikanan Budidaya

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	<i>Persentase ketersediaan data serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan pembudidayaan ikan (%)</i>	62	100	3.232.600.00	100	3.444.770.00	100	3.662.932.00	100	3.888.905.00	100	4.172.702.00	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Dokumen)	1	1	18.850.000	1	20.170.000	1	21.582.000	1	23.100.000	1	24.717.000	Dokumen statistik perikanan budidaya
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Unit)	20	2	1.350.000.00	2	1.444.500.00	2	1.545.000.00	2	1.653.150.00	2	1.769.000.00	Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	-	3	3.750.000	4	4.100.000	5	4.350.000	6	4.655.000	7	4.985.000	Uji laboratorium terkait kesehatan ikan dan lingkungan budidaya

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Unit)	12	10	1.650.000.000	12	1.750.000.000	14	1.850.000.000	16	1.950.000.000	18	2.100.000.000	Pengadaan sarana pendukung budidaya ikan, pakan ikan, pengadaan bahan baku pakan ikan.
Pembiayaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	-	7	105.000.000	9	113.000.000	11	121.000.000	13	129.000.000	15	137.000.000	
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	-	7	105.000.000	9	113.000.000	11	121.000.000	13	129.000.000	15	137.000.000	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rasio Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan dalam Kegiatan Usaha Perikanan (%)	-	100	100.000.000	100	609.000.000	100	118.000.000	100	127.000.000	100	686.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase pelaku usaha perikanan yang sadar dan patuh terhadap peraturan (%)</i>	-	100	100.000.000	100	609.000.000	100	118.000.000	100	127.000.000	100	686.000.000	
Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten /kota (Pelaku Usaha)	-	15	20.000.000	18	22.000.000	21	24.000.000	24	26.000.000	27	28.000.000	Monitoring usaha budidaya ikan
Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten /kota (Pelaku Usaha)	-	20	20.000.000	23	22.000.000	26	24.000.000	29	26.000.000	32	28.000.000	Monitoring usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten /kota (Pelaku Usaha)	-	15	20.000.000	20	22.000.000	25	24.000.000	30	26.000.000	35	28.000.000	Monitoring usaha penangkapan ikan di wilayah perairan umum
Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan (Unit)	-	-	-	1	500.000.000	-	-	-	-	1	550.000.000	Pengadaan kapal pengawas perikanan
Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumberdaya perikanan yang dibentuk (Orang)	-	20	40.000.000	20	43.000.000	20	46.000.000	20	49.000.000	20	52.000.000	Pembentukan sumber daya pokmaswas
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun)	33,58	39	1.289.000.000	42	1.391.000.000	45	1.498.000.000	48	1.605.000.000	51	1.712.000.000	
<i>Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Persentase ketersediaan data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (%)</i>	100	100	19.000.000	100	21.000.000	100	23.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	19.000.000	1	21.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	Dokumen statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
<i>Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	<i>Persentase ketersediaan unit usaha pengolahan dan pemasaran yang terlatih dan telah memperoleh izin usaha (%)</i>	100	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	7	8	110.000.000	10	120.000.000	12	130.000.000	14	140.000.000	16	150.000.000	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil olahan ikan

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan ketersediaan ikan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan (%)</i>	35	100	660.000.000	100	710.000.000	100	765.000.000	100	820.000.000	100	875.000.000	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota (Ton)	2.522,10	2.969	465.000.000	3.177	500.000.000	3.399	540.000.000	3.637	580.000.000	3.892	620.000.000	Promosi hasil usaha pengolahan dan pemasaran ikan
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	-	6	195.000.000	8	210.000.000	10	225.000.000	12	240.000.000	14	255.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</i>	<i>Persentase Ketersediaan Fasilitas Akses Pasar dan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan (%)</i>	-	100	500.000.000	100	540.000.000	100	580.000.000	100	620.000.000	100	660.000.000	
Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil (Kg/Kapita/Tahun)	-	39	500.000.000	42	540.000.000	45	580.000.000	48	620.000.000	51	660.000.000	Promosi hasil usaha pengolahan dan pemasaran ikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	81,75	82,5	9.193.500.000	83	8.882.500.000	83,5	10.753.500.000	84	10.381.500.000	84,5	12.314.000.000	
	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76,17	77,5		78		78,5		79		79,5		
	Manajemen Resiko Indeks (Level)	-	3,3		3,4		3,5		3,6		3,7		
<i>Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tertib pelaporan capaian kinerja, rencana kerja dan penganggaran (%)</i>	100	100	121.000.000	100	135.000.000	100	149.000.000	100	163.000.000	100	177.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.000.000	2	39.000.000	2	42.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	16.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1	23.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1	23.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	21.000.000	1	23.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.000.000	2	39.000.000	2	42.000.000	
<i>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tertib administrasi dan pelaporan keuangan (%)</i>	100	<i>100</i>	<i>5.655.000.000</i>	<i>100</i>	<i>6.166.000.000</i>	<i>100</i>	<i>6.677.000.000</i>	<i>100</i>	<i>7.188.000.000</i>	<i>100</i>	<i>7.699.000.000</i>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang /Bulan)	30	37	5.500.000.000	40	6.000.000.000	43	6.500.000.000	46	7.000.000.000	49	7.500.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	145.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	12	175.000.000	12	185.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000	
<i>Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Tertib Penataan dan Pengelolaan BMD /Aset (%)</i>	100	100	10.500.000	100	12.000.000	100	13.500.000	100	15.000.000	100	16.500.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.500.000	1	12.000.000	1	13.500.000	1	15.000.000	1	16.500.000	
<i>Keg. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)</i>	<i>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)</i>	-	100	20.000.000	100	21.500.000	100	23.000.000	100	24.500.000	100	26.000.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	-	4	20.000.000	4	21.500.000	4	23.000.000	4	24.500.000	4	26.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase tingkat disiplin aparatur (%)</i>	-	100	62.000.000	100	66.500.000	100	73.000.000	100	77.500.000	100	84.500.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	1	20.000.000	1	21.500.000	2	25.000.000	2	26.500.000	3	30.500.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	2	42.000.000	2	45.000.000	2	48.000.000	2	51.000.000	2	54.000.000	
<i>Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan pemenuhan layanan umum kedinasan (%)</i>	50	100	428.000.000	100	464.500.000	100	501.000.000	100	537.500.000	100	574.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	12	12.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	12	10.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000	12	18.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	12	24.000.000	12	26.000.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	12	32.000.000	12	34.000.000	12	36.000.000	12	38.000.000	12	40.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.060	4.080	37.500.000	4.080	40.000.000	4.080	42.500.000	4.080	45.000.000	4.080	47.500.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	-	12	7.500.000	12	8.500.000	12	9.500.000	12	10.500.000	12	11.500.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	130	250.000.000	140	270.000.000	150	290.000.000	160	310.000.000	170	330.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.000.000	1	19.500.000	1	21.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	20.000.000	1	21.500.000	1	23.000.000	1	24.500.000	1	26.000.000	
<i>Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang fungsi kedinasan (%)</i>	96	100	1.430.000.000	100	450.000.000	100	1.650.000.000	100	610.000.000	100	1.870.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	1	530.000.000	-	-	1	560.000.000	-	-	1	590.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	1	530.000.000	-	-	1	560.000.000	-	-	1	590.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20	3	40.000.000	6	80.000.000	9	120.000.000	12	160.000.000	15	200.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	14	160.000.000	16	180.000.000	18	200.000.000	20	220.000.000	22	240.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	4	170.000.000	6	190.000.000	8	210.000.000	10	230.000.000	12	250.000.000	
<i>Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan penunjang layanan kedinasan (%)</i>	100	100	700.500.000	100	750.500.000	100	800.500.000	100	850.500.000	100	900.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	260.500.000	12	280.500.000	12	300.500.000	12	320.500.000	12	340.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	440.000.000	12	470.000.000	12	500.000.000	12	530.000.000	12	560.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
<i>Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarpras dan bangunan yang terpelihara fungsinya (%)</i>	80	100	766.500.00 0	100	816.500.00 0	100	866.500.000	100	915.500.00 0	100	966.500.00 0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	8	316.500.00 0	9	336.500.00 0	10	356.500.000	11	376.000.00 0	12	396.500.00 0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	-	8	316.500.00 0	9	336.500.00 0	10	356.500.000	11	376.000.00 0	12	396.500.00 0	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	10	20.000.000	12	21.500.000	14	23.000.000	16	24.500.000	18	26.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	33	28.000.000	35	30.000.000	37	32.000.000	39	34.000.000	41	36.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	1	1	66.000.000	1	70.500.000	1	75.000.000	1	79.500.000	1	84.000.000	

BUDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUBKEGIATAN /OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Unit)	22	40	19.500.000	42	21.500.000	44	23.500.000	46	25.500.000	48	27.500.000	
JUMLAH PAGU				16.505.150. 000		17.271.745. 000		19.233.490. 000		18.861.913. 000		21.956.052. 000	

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	<i>Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			<i>Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten /Kota</i>	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			<i>Keg. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i>	
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			<i>Keg. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</i>	
			Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	
			<i>Keg. Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</i>	
Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.				
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	<i>Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>	
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rasio Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan dalam Kegiatan Usaha Perikanan (%)	Keg. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten /Kota	
			Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
			Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/ atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/ kota	
			Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	
			Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Keg. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
			<i>Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			<i>Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota</i>	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	
			<i>Keg. Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</i>	
			Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang

bersangkutan, yang menjadi core areal business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Total Produksi Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82	82,50	83	83,50	84	84,50	
3	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	77,50	78	78,50	79	79,50	
4	Manajemen Resiko Indeks	Level	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	

4.2.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, program, atau proyek dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karakteristik IKK harus spesifik dan jelas dalam mengukur kinerja, dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, harus akurat dalam mengukur kinerja dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perikanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Total Produksi Perikanan	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 – 2029 yang merupakan acuan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai konsekwensi instansi pemerintah yang akuntabel. Partisipasi seluruh komponen organisasi, instansi terkait dan stakeholder dalam setiap langkah pelaksanaannya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan perikanan serta sebagai tolok ukur. Perencanaan Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Deli Serdang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, dalam penyusunannya sangat memerlukan integrasi antara keahlian Sumberdaya Manusia dan sumberdaya Perikanan agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan sekaligus dapat menjawab tantangan, tuntutan perkembangan strategis Daerah, Regional, Nasional dan Global.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan seluruh pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan terkait pembangunan dan pengembangan perikanan memiliki pedoman yang jelas dalam mengarahkan program, kegiatan dan subkegiatan untuk lima tahun ke depan. Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai komitmen bersama untuk membangun dan mengembangkan potensi perikanan guna terciptanya kesejahteraan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan dan pembudidaya ikan.